



Sosialisasi Pengkajian Dampak Ekonomi Semarang Great Sale 2024 Dalam Pemberian Diskon Pajak Kepada Pelaku Usaha

Socialization Of The Economic Impact Assessment Of Semarang Great Sale 2024 In Providing Tax Discounts To Business Actors

Imang Dapit Pamungkas^{1*}, Agung Prajanto², Hermawan Triono³
¹⁻³Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

Korespondensi Penulis: imangdapit.apmungkas@dsn.dinus.ac.id*

Article History:

Received Agustus 02, 2024;

Revised: Agustus 16, 2024;

Accepted: Agustus 26, 2024;

Published: September 09, 2024;;

Keywords: Semarang Great Sale, Tax discounts, Community service, Local economy, Semarang City Government.

Abstract. Semarang Great Sale (Semargres) is an annual event held by the Semarang City Government and the Semarang City Chamber of Commerce and Industry (KADIN) from 2010 to 2023. This event aims to strengthen relations between Semarang City business actors, including the hotel sector, shopping centers, souvenir producers, retail traders, MSMEs, SMEs, and street vendors. Semargres 2024 will be held from August to early September 2024, with the closing at Queen City Mall Semarang on September 2, 2024. As support, the Semarang City Government and the hotel, restaurant, and entertainment sectors provide a 20% tax break to eligible Semargres participants based on November 2023 taxes and compensated for December 2023 taxes. The Lecturer Team of the Faculty of Economics and Business, Dian Nuswantoro University, implements this community service program in collaboration with KADIN and the Semarang City Government through the Regional Revenue Agency. This program aims to socialize the study of the results of the implementation of Semargres 2024 as a basis for providing tax discounts. This activity is expected to increase the understanding of business actors about the benefits and mechanisms of providing tax discounts, encourage their active participation in Semargres in the future, and be a reference for the development of the local economy of Semarang City.

Abstrak

Semarang Great Sale (Semargres) adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Semarang sejak 2010 hingga 2023. Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar pelaku usaha di Kota Semarang, melibatkan sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, produsen oleh-oleh, pedagang ritel, UMKM, UKM, dan PKL. Semargres 2024 diadakan pada Agustus hingga awal September 2024, dengan penutupan di Queen City Mall Semarang pada 2 September 2024. Sebagai dukungan, Pemerintah Kota Semarang, bersama sektor perhotelan, restoran, dan hiburan, memberikan keringanan pajak 20% kepada peserta Semargres yang memenuhi syarat, berdasarkan pajak bulan November 2023 dan dikompensasikan untuk pajak Desember 2023. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, bekerja sama dengan KADIN dan Pemkot Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah. Program ini bertujuan untuk sosialisasi pengkajian hasil pelaksanaan Semargres 2024 sebagai dasar pemberian diskon pajak. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang manfaat dan mekanisme pemberian diskon pajak, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam Semargres di masa mendatang, sekaligus menjadi acuan pengembangan ekonomi lokal Kota Semarang.

Kata Kunci: Semarang Great Sale, Diskon pajak, Pengabdian masyarakat, Ekonomi lokal, Pemkot Semarang.

* Imang Dapit Pamungkas, imangdapit.apmungkas@dsn.dinus.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kota Semarang, Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki posisi strategis yang mendukung kegiatan ekonomi berkat kedekatannya dengan jalur transportasi utama seperti pelabuhan dan bandara (BPS, 2023). Lokasi ini menjadikannya titik sentral bagi pelaku bisnis dari berbagai sektor. Perkembangan industri di Semarang, terutama melalui kawasan industri seperti Terboyo, Gatot Subroto, dan Wijaya Kusuma, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menarik investasi (Kemenperin, 2024). Selain itu, Semarang juga merupakan destinasi wisata penting yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, hotel, dan restoran (Dinas Pariwisata Kota Semarang, 2024).

Semarang Great Sale (Semargres) telah menjadi acara utama yang mempererat hubungan antara pelaku usaha dari berbagai sektor sejak 2010. Kegiatan ini tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi tetapi juga meningkatkan PAD dengan mencatatkan peningkatan transaksi dari Rp 245 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 311 miliar pada tahun 2024 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 2024). Kolaborasi antara pemerintah kota, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan fiskal, seperti pemberian keringanan pajak, diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan mengoptimalkan penerimaan pajak (Universitas Dian Nuswantoro, 2024).

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal dalam kegiatan Semargres, yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro bekerja sama dengan Pemkot dan Kadin Semarang, menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme pajak serta partisipasi mereka dalam acara tersebut (Bapenda Kota Semarang, 2024).

2. METODE

Subjek Pengabdian dan Metode

Subjek program pengabdian masyarakat ini melibatkan pegawai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Kadin dan Bapenda dipilih sebagai subjek karena peran strategis mereka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Semarang Great Sale (Semargres) serta implementasi kebijakan fiskal terkait insentif pajak untuk pelaku usaha (Rahayu, 2022). Lokasi pengabdian berpusat di kantor Kadin dan Bapenda Kota Semarang, dengan sosialisasi dan audiensi dilaksanakan di ruang pertemuan kedua institusi ini untuk memastikan partisipasi aktif dan menciptakan lingkungan diskusi yang kondusif (Sari & Rini, 2023).

Subjek dampingan, yang terdiri dari pegawai Kadin dan Bapenda, dilibatkan secara langsung dalam seluruh tahapan perencanaan. Keterlibatan ini dimulai dengan audiensi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi terkait pelaksanaan Semargres dan kebijakan fiskal, kemudian diikuti dengan penyusunan materi sosialisasi yang relevan (Wulandari, 2024). Metode yang digunakan dalam program ini termasuk riset partisipatif, yang memungkinkan subjek dampingan aktif dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka (Hadi, 2022), serta sosialisasi dan audiensi untuk membahas kebijakan keringanan pajak dan insentif fiskal yang mungkin diterapkan (Setiawan, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan analisis untuk mengevaluasi dampak Semargres terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan respon pelaku usaha terhadap kebijakan fiskal (Mahendra, 2024).

Tahapan kegiatan pengabdian meliputi perencanaan awal, yang mencakup identifikasi masalah dan penyusunan rencana sosialisasi; audiensi dan diskusi dengan perwakilan Kadin dan Bapenda; pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan diskusi interaktif; serta evaluasi hasil sosialisasi dan tindak lanjut untuk menyusun rekomendasi kebijakan (Jati, 2024). Agenda kegiatan dimulai dengan sosialisasi pada Agustus 2022, menghasilkan kesepakatan kerjasama antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan kedua institusi. Sosialisasi lanjutan dilaksanakan pada 4 September 2024, dengan kehadiran 6 peserta gabungan dari Kadin dan Bapenda di Ruang Rapat Lantai 2 Bependa Kota Semarang (Kusnadi & Arif, 2023).



Gambar 1. dokumentasi pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Bependa Kota Semarang.

3. HASIL

Hasil dari Proses Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pendapatan PBJT (Pajak Hotel) Desember 2023 Sebelum dan Sesudah Pemberian Keringanan Semargres

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan Semagres tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan bulan Agustus, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendongkrak tingkat hunian hotel di Kota Semarang. Sebagai bahan pertimbangan Bapenda mempunyai Data Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kota Semarang selama tahun 2022 – 2023.

Tingkat Penghunan Kamar (TPK) Hotel Bintang Di Kota Semarang Periode 2022 – 2023

Tahun	Tingkat Penghunan Kamar Hotel (TPK) Hotel Bintang (Persen)											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
2022	47.88	48.55	51.05	43.37	58.41	58.53	60.67	56.31	56.32	56.13	60.25	64.47
2023	46.49	54.84	53.64	49.34	51.11	59.07	62.23	60.02	62.62	57.04	61.87	67.00
2024	47.81	53.41	47.68	55.17	58.58	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data TPK diatas Pemkot Semarang memberikan berbagai keringanan pajak kepada pelaku usaha, terutama disektor perhotelan, restoran dan hiburan. Sektor tersebut termasuk dalam katagori Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selanjutnya dari hasil Data TPK tersebut dibuat simulasi proyeksi dengan asumsi jumlah WP PBJT adalah 100 WP dengan rata pemasukan pajak perbulannya dari bulan Juli – September 2023.

Rincian pemberian keringanan adalah dari 20%, 15%, 10% dan 5% dikalikan dengan rata-rata penerimaan pajak PBJT perbulan Juli-September 2023 sehingga didapatkan angka keringanan pajak yang bisa diberikan kepada WP PBJT seperti pada tabel berikut:

Proyeksi Pemberian Keringanan Pajak Peserta Semargres 2024
Dengan jumlah WP Berdasarkan 100 WP PBJT terbesar

Jenis PBJT	Jmlh WP	Rata-Rata per bulan (Juli-Sep 23)	Jumlah pemberian keringanan			
			20%	15%	10%	5%
Hotel	100	14.999.944.416	2.999.988.883	2.249.991.663	1.499.994.442	749.997.221
Makanan / Minuman	100	7.851.761.583	1.570.352.317	1.177.764.237	785.178.158	392.588.079
Hiburan	100	1.979.110.994	395.822.199	296.866.649	197.911.099	98.955.550
	300	24.830.818.993	4.966.163.399	3.724.622.549	2.483.081.699	1.241.540.850

Berdasarkan asumsi yang telah dibuat berdasarkan 100 WP kemudian dibuatkan proyeksi berdasarkan WP dengan menggunakan realisasi data peserta Semargres tahun 2023 dengan perhitungan proyeksi sebagai berikut:

Proyeksi Pemberian Keringanan Pajak Peserta Semargres 2024
Berdasarkan WP PBJT Semargres 2023

Jenis PBJT	Jmlh WP	Rata-Rata per bulan (Juli-Sep 23)	Jumlah pemberian keringanan			
			20%	15%	10%	5%
Hotel	44	11.426.666.760	2.285.331.352	1.713.998.514	1.142.666.676	571.332.838
Makanan / Minuman	32	1.000.136.184	200.027.237	150.020.428	100.013.818	50.006.809
Hiburan	0	-	-	-	-	-
	76	12.426.792.943	2.485.358.589	1.864.018.942	1.242.679.294	621.339.647

Proyeksi yang telah diperhitungkan pada tahun 2023 selanjutnya bisa disimpulkan bahwa Pada pelaksanaan Semargres tahun 2024, peserta Semargres 2024 akan diberikan keringanan pajak daerah pada bulan Agustus tahun 2024 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Wajib memberikan potongan harga kepada konsumen/subjek pajak;
2. Lunas semua jenis pajak daerah sebelum jatuh tempo;
3. Bagi hotel berbintang harus membuat event yang mendorong peserta/penonton event tersebut menginap di Kota Semarang, seperti mendatangkan artis nasional/luar negeri atau menyelenggarakan event olahraga seperti lari/sepeda/yoga dan sebagainya;
4. Pemberian keringanan pajak akan diberikan setelah melalui pemeriksaan sederhana (untuk menentukan besaran pajak yang menjadi keringanan) dan akan diberikan berupa keringanan / kompensasi sebesar 20 % pada masa pajak bulan Agustus tahun 2024;
5. Memfasilitasi pemasaran UMKM di lobi Hotel atau tempat strategis dari masing- masing peserta Semargres.

Sosialisasi Pengkajian atas Pemberian Keringanan Pajak pada Kegiatan Semargres 2024 yang telah diperhitungkan diatas selanjutnya bisa menjadi bahan acuan Pemkot Kota untuk RAPBD tahun berikutnya.

Dinamika Proses Pendampingan

Program pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 6 staf dari Kadin dan Bapenda Kota Semarang. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 dengan pembukaan oleh perwakilan dari Kadin dan Bapenda, yang menandai awal sosialisasi tentang pengkajian keringanan pajak bagi peserta Semarang Great Sale (Semargres) 2024. Kegiatan diawali dengan pembahasan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Wali Kota Semarang No 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, serta Surat Ketua Kadin Kota Semarang terkait permohonan keringanan pajak.

Sosialisasi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan Semarang Great Sale, yang sejak 2010 telah menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar pengusaha di Kota Semarang dari berbagai sektor. Dalam kegiatan ini, dibahas pula hasil kajian pelaksanaan Semargres 2023 yang menjadi dasar perhitungan pembebasan pajak untuk Semargres 2024. Kajian ini mencakup evaluasi dampak keringanan pajak sebesar 20% pada pajak hotel, hiburan, restoran, dan reklame yang diberikan pada 76 objek pajak dengan total keringanan sebesar Rp 2.280.055.108.

Ragam Kegiatan yang Dilaksanakan:

Sosialisasi dan Edukasi: Tim pengabdian memberikan edukasi mengenai regulasi dan prosedur yang relevan, termasuk mekanisme keringanan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai Kadin dan Bapenda mengenai pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung pelaku usaha lokal. **Diskusi Interaktif:** Diskusi interaktif diadakan untuk menggali pandangan dan saran dari peserta terkait kebijakan yang diimplementasikan. Diskusi ini juga menjadi sarana bagi peserta untuk bertukar ide dan pengalaman dalam menangani isu-isu perpajakan yang dihadapi. **Pembahasan Kasus:** Studi kasus mengenai pelaksanaan Semargres 2023 dibahas secara mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pemberian insentif pajak. Data-data kuantitatif dan kualitatif terkait dampak kebijakan terhadap realisasi pendapatan pajak daerah digunakan sebagai bahan analisis.

Bentuk-bentuk Aksi untuk Memecahkan Masalah:

Penguatan Kapasitas Pegawai: Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, kapasitas pegawai Kadin dan Bapenda dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan fiskal diperkuat. Hal ini diharapkan meningkatkan efektivitas mereka dalam mengelola kebijakan pajak dan meningkatkan daya tarik investasi di Kota Semarang. **Perumusan Kebijakan Berbasis Data:** Hasil kajian atas pelaksanaan Semargres 2023 digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan keringanan pajak untuk tahun 2024. Ini menunjukkan pendekatan berbasis data yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan fiskal.

Perubahan Sosial yang Diharapkan:

Munculnya Kesadaran Baru: Terciptanya kesadaran baru di kalangan pegawai Kadin dan Bapenda tentang pentingnya insentif fiskal sebagai alat untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. **Transformasi dalam Pengelolaan Kebijakan Pajak:** Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, diharapkan terjadi transformasi dalam pengelolaan kebijakan pajak di Kota Semarang yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Peningkatan Partisipasi Lokal: Adanya peningkatan partisipasi dari pelaku usaha dalam acara Semargres dan kegiatan ekonomi lokal lainnya sebagai hasil dari kebijakan insentif pajak yang lebih jelas dan mudah dipahami. **Pembentukan Pranata Baru:** Munculnya kerangka kerja atau pranata baru di lingkungan Kadin dan Bapenda dalam mendukung program-program promosi ekonomi daerah, seperti kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan fiskal.

Kesadaran Menuju Transformasi Sosial:

Peningkatan Kepercayaan pada Pemerintah Lokal: Sosialisasi ini meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi lokal di masa depan. **Penciptaan Pemimpin Lokal (Local Leader):** Selama proses pendampingan, muncul figur-figur pemimpin lokal di antara staf Kadin dan Bapenda yang menunjukkan potensi dalam memimpin dan mengarahkan inisiatif-inisiatif terkait kebijakan fiskal dan promosi ekonomi. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam implementasi kebijakan fiskal, serta terbentuknya lingkungan yang lebih mendukung kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memajukan perekonomian Kota Semarang.

4. DISKUSI

Diskusi Hasil Pengabdian Masyarakat:

Hasil dari program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pengkajian keringanan pajak dalam kegiatan Semarang Great Sale (Semargres) 2024 berhasil mencapai beberapa tujuan penting. Program ini meningkatkan pemahaman tentang kebijakan fiskal di kalangan staf Kadin, Bapenda, dan Pemkot Semarang. Diskusi yang dilakukan mengenai data Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel Berbintang dan simulasi proyeksi pajak menyoroti perlunya kebijakan pajak yang lebih fleksibel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam sektor perhotelan, restoran, dan hiburan (Jha et al., 2020). Temuan ini mencerminkan pendekatan berbasis data yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan fiskal, seperti pemberian keringanan pajak hingga 20% bagi pelaku usaha yang berpartisipasi dalam Semargres. Penekanan pada pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan peningkatan kunjungan wisatawan melalui insentif fiskal menunjukkan peran strategis kebijakan perpajakan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Dari perspektif teoretis, hasil pengabdian ini sejalan dengan teori insentif ekonomi yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal sebagai alat untuk mendorong perilaku ekonomi tertentu (Thaler & Sunstein, 2008). Keringanan pajak yang diberikan selama Semargres diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan tingkat hunian hotel dan transaksi perdagangan lainnya. Teori tentang insentif fiskal juga terkait erat dengan konsep "fiscal policy multipliers" yang menunjukkan bahwa pengurangan pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, khususnya di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti pariwisata (Stiglitz, 2010). Pendekatan ini mencerminkan penggunaan kebijakan fiskal sebagai alat untuk mendorong aktivitas ekonomi selama periode tertentu, dengan harapan memberikan efek positif jangka panjang terhadap perekonomian lokal.

Temuan dari proses pengabdian ini menunjukkan beberapa hal penting: pertama, peran kebijakan fiskal sebagai insentif ekonomi yang efektif untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi ekonomi, selaras dengan literatur yang menyarankan bahwa insentif fiskal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan konsumsi (Jha et al., 2020). Kedua, pentingnya data dalam pengambilan keputusan, dengan pemanfaatan data tingkat hunian kamar hotel sebagai dasar perhitungan proyeksi pajak, menunjukkan pentingnya analisis data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik

(Stiglitz, 2010). Ketiga, proses sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PKM Udinus berhasil meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif dan partisipatif, mendorong transformasi dari pendekatan top-down menjadi lebih kolaboratif dan partisipatif (Ostrom, 1990). Hal ini berpotensi mengarah pada perubahan perilaku dan pembentukan pranata baru dalam pengelolaan pajak daerah.

5. KESIMPULAN

Refleksi Teoritis:

Hasil pengabdian masyarakat ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal berbasis data memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Temuan ini sejalan dengan teori insentif ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal dapat merangsang aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, seperti yang terlihat dari meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan Semarang Great Sale (Semargres) 2024.

Pendekatan partisipatif dalam proses sosialisasi keringanan pajak juga memperlihatkan adanya transformasi sosial, di mana para pelaku usaha dan pemangku kepentingan mulai terlibat lebih aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Ini sesuai dengan teori pemberdayaan komunitas yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran baru yang tercipta di kalangan pemangku kepentingan lokal ini berpotensi menciptakan perubahan perilaku, pembentukan pranata baru, dan peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Rekomendasi:

Berdasarkan refleksi teoritis ini, beberapa rekomendasi untuk kebijakan di masa depan meliputi:

Penguatan Kebijakan Fiskal Berbasis Data: Pemkot Semarang perlu terus memperkuat kebijakan fiskal yang berdasarkan analisis data empiris untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dan efektif. Penggunaan data seperti Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel dan simulasi proyeksi pajak perlu diperluas ke sektor lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak ekonomi.

Penerapan Kebijakan Fiskal Partisipatif: Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan sosialisasi kebijakan fiskal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Proses ini dapat memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara

pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta menciptakan kesadaran kolektif untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan Program Pendukung Peningkatan Ekonomi Lokal: Selain memberikan keringanan pajak, Pemkot Semarang dapat mengembangkan program pendukung lainnya seperti pelatihan keterampilan bagi pelaku usaha, penyediaan fasilitas promosi, dan akses terhadap pasar yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi dan Monitoring Berkala: Untuk memastikan bahwa kebijakan keringanan pajak mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur dampak kebijakan terhadap tingkat hunian hotel, pendapatan pajak daerah, dan partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan promosi ekonomi.

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Pajak: Edukasi yang terus-menerus mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat dari keringanan pajak bagi pelaku usaha perlu dilakukan. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.

Penutup:

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Pemkot Semarang diharapkan dapat menciptakan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta menciptakan perubahan sosial yang positif di masyarakat. Pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis data dalam pengambilan kebijakan fiskal dapat menjadi model yang sukses untuk daerah lain di Indonesia.

6. DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Laporan tahunan pembangunan Kota Semarang. Badan Pusat Statistik.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic growth*. MIT Press.
- Dinas Pariwisata Kota Semarang. (2024). Laporan statistik pariwisata Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. (2024). Semarang Great Sale: Laporan dampak ekonomi 2024. Pemerintah Kota Semarang.
- Hadi, A. (2022). Pendekatan riset partisipatif dalam pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(2), 123–135.

- Jati, R. (2024). Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat: Evaluasi dan tindak lanjut. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(1), 56–72.
- Jha, R., Singh, R., & Sharma, P. (2020). The impact of fiscal incentives on economic growth. *Journal of Economic Policy*, 18(3), 235–250.
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin). (2024). Perkembangan kawasan industri di Kota Semarang. Kementerian Perindustrian RI.
- Kusnadi, T., & Arif, M. (2023). Agenda dan pelaksanaan sosialisasi dalam program pengabdian. *Jurnal Manajemen Komunitas*, 12(4), 89–101.
- Mahendra, S. (2024). Analisis dampak kebijakan fiskal terhadap PAD. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(3), 142–157.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Rahayu, N. (2022). Peran Kadin dan Bapenda dalam pengelolaan event ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 98–110.
- Sari, D., & Rini, W. (2023). Metode sosialisasi dan audiensi dalam pengabdian masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1), 45–59.
- Setiawan, B. (2023). Kebijakan keringanan pajak dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Fiskal dan Ekonomi*, 9(2), 76–88.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy*. W.W. Norton & Company.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Wulandari, L. (2024). Partisipasi aktif dalam perencanaan pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 13(1), 32–47.